2

Pelestarian Tradisi dan Budaya *Pela Gandong* bagi Pencegahan Konflik Sosial di Kota Ambon

Preservation of Pela Gandong Tradition and Culture for Social Conflict Prevention in Ambon City

C. Elly Kumari Tjahya Putri
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta. <email: ellyktp@gmail. Com>
Diterima 13 November 2013, direvisi 15 Januari, Disetujui 24 Februari 2014.

Abstract

Social conflicts and collective violence interethnic rife in various regions in Indonesia, including Ambon city. Considering the existence of local wisdom called pela gandong (norms or values of a tradition that upholds the values of social solidarity), it was such an irony that Ambon city residents involved in violence ang amok. This situation call for an examination of the causes of such a social conflict. Social conflict caused many casualties. In order to uncover the role of pela gandong in fostering social soldarity attitudes among Ambon city residents post conflict, a research on "Preservation of Pela Gandong Tradition and Culture for Social Conflict Prevention in Ambon City" had been conducted applying survey and case methods. This study led to the founding that the cause of social conflict in Ambon city is due to increasing migration flows which impacting the increasing number of unemployment in the city of Ambon. Migrant or immigrants can not readily adjust to the culture of the natives which in turn cultivate an attitude of mutual suspicion between them. Along with modernization, decreasing authority of social institutions accompanied by increasing waning of traditional values (pela gandong) primarily among young people make people easily negatively provoked by various parties. But post–conflict there occurs associative, acculturation, accomodation, assimilation processes in public life as can be seen from the high attitude of social solidarity posed. For the prevention of social conflicts in the future it is recomended to develop social capital and to strengthen social insitutions to preserve traditional institutions and also to held dialogues in both horizontal and vertical dimension.

Keywords:
Preservation- Tradition and Culture-Social Conflict-Prevention

Abstrak

Konflik sosial antar etnis dan kekerasan kolektif di berbagai daerah di Indonesia. Terbiasanya masyarakat dengan perilaku kekerasan dan amuk massa, memudarnya nilai-nilai sosial dan melemahnya pranata sosial. memicu disintegrasi Hal ini menuntut suatu kajian penyebab terjadinya konflik sosial di berbagai daerah, seperti halnya di Kota Ambon. Konflik sosial menimbulkan banyak korban sangatlah ironis terjadi di kalangan masyarakat Kota Ambon yang memiliki nilai kearifan lokal *pela gandong*, suatu norma atau tradisi dan budaya yang menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial. Agar mendapatkan informasi mengenai seberapa besar peran nilai kearifan lokal dalam menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial warga Kota Ambon pasca konflik sosial, dilakukan penelitian mengenai "Pelestarian tradisi dan budaya *pela gandong* bagi pencegahan konflik sosial di Kota Ambon". Kajian menggunakan metode survey dan kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penyebab terjadinya konflik sosial di Kota Ambon, karena makin meningkatnya arus migrasi, berdampak jumlah pengganggguran meningkat di Kota Ambon, juga lambannya para migran atau pendatang menyesuaikan dengan budaya penduduk asli, sehingga menumbuhkan sikap saling curiga antara penduduk asli dan para migran Seiring dengan modernisasi, makin menurunnya kewibawaan pranata sosial. serta makin memudarnya nilai-nilai tradisional "*pela gandong*" utamanya dikalangan generasi muda, nilai tradisi tersebut menjunjung tinggi, perilaku dan sikap kerukunan kesetiakawanan sosial kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat mudah terprovokasi oleh berbagai pihak. Tetapi pasca konflik, terjadi proses asosiatif, akulturasi, akomodasi, asimilasi, dalam kehidupan masyarakat, tampak dari masih tingginya sikap kesetiakawanan sosial. Rekomendasi yang diajukan guna pencegahan konflik sosial mengembangkan modal sosial (*social capital*) dan memperkuat pranata sosial, untuk itu perlu dilestarikan lembaga adat, juga dilaksanakan dialog baik secara horisontal maupun vertikal.

Kata Kunci:
Pelestarian- Tradisi dan Budaya-Pencegahan-Konflik Sosial

A. Pendahuluan

Nasib tragis dialami bangsa Indonesia saat ini karena pada saat menghadapi banyak masalah, masyarakat cenderung melakukan tindakan kekerasan yang kadang-kadang dipicu oleh masalah yang sangat sederhana. Masyarakat menjadi terbiasa dengan perilaku kekerasan dan amuk masa, karena macetnya saluran hukum, juga memudarnya nilai tradisi dan budaya, merupakan kearifan lokal yang menjunjung tinggi sikap kesetiakawanan sosial, menjadi modal sosial bagi integrasi sosial bangsa indonesia yang multikultural. integrasi sosial akan lebih mudah dicapai bila harkat dan martabat manusia dihormati serta hak-hak asasi manusia secara universal diakui. Oleh sebab itu, diperlukan upaya agar lembaga pemerintahan dan institusi masyarakat (pranata sosial) menjadi lebih tanggap kepada kebutuhan masyarakat. sehingga diharapkan masyarakat mampu berperan secara penuh dalam kegiatan pembangunan. Dewasa ini musuh utama bangsa Indonesia adalah berbagai bentuk kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi, sosial maupun budaya, juga terjadinya disintegrasi sosial Permasalahan sosial tersebut di atas menyebabkan sederetan protes sosial dengan beragam dinamikanya. Hal ini mengejutkan banyak pihak tidak hanya di pihak pemerintah maupun pakar politik sosial dan budaya, bahkan yang terkait dengan bidang pendidikan. Protes sosial masyarakat yang berkembang merupakan akumulasi akibat kesenjangan ekonomi, politik serta hukum dan sosial maupun budaya

Apabila ditinjau dari dinamika konflik di Kota Ambon bisa dibagi dalam empat kasus kejadian atau tiga episode kejadian, dimulai pada episode pertama bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1419, yaitu tanggal 19 Januari 1999 konflik diawali dari terjadinya perkelahian antara warga pemuda kampung Batumerah dengan pemuda kampung Mardika. Konflik yang terjadi antara massa putih dari kampung Batumerah (disebut kelompok yang berpakaian serba putih dari kelompok muslim dan kelompok merah kelam yang berasal dari kelompok Kristen). Dari kedua kubu tersebut, menyatakan bahwa kebanyakan mereka tidak mengetahui siapa saja yang terlibat konflik, sebab tidak ada kejelasan dalam konflik sosial siapa melawan siapa, apa alasannya. Konflik episode kedua terjadi sekitar dua bulan memasuki akhir bulan Juli 1999 konflik kembali pecah di Ambon ,dimulai di perumahan Poka tanggal 24 Juli 1999. Konflik di perumahan Poka Kota Ambon merembet ke Kota-Kota lainnya. Selanjutnya episode ketiga muncul pada tanggal 26 April 2000, ketegangan di Ambon, makin meningkat karena isu datangnya kaum jihad dari Yogyakarta menyebabkan makin tingginya semangat konflik dari pihak kelompok Kristen. Pada tahun 2009 kemelut konflik sudah dapat diredam, namun sejauh mana kadar sikap kesetiakawanan sosial warga masyarakat Kota Ambon yang bertikai tersebut, menjadi dasar berperilaku dan bertindak dikalangan masyarakat. Setelah satu dasa warsa, terjadinya konflik tersebut, ternyata menimbulkan dampak keresahan yang hebat, di komunitas masyarakat Maluku. Konflik episode ketiga terjadi pada tanggal 30 April 2000, merupakan aksi balas membalas berlanjut menjadi konflik yang beruntun di perbatasan Batumerah dan Mardika. Dalam konflik tersebut banyak yang menjadi korban, sedikitnya 13 orang meninggal dan sekitar 50 orang luka-luka. Konflik episode ketiga ini tidak lagi bersifat sporadis tetapi telah menjadi "perang Kota". Dampak dari konflik pada saat itu, ditandai dengan perginya seluruh lembaga bantuan kemanusiaan dari luar, khususnya warga internasional dari Ambon. Sebanyak 16 orang warga asing yang bekerja di Kota Ambon dalam misi kemanusiaan dievakuasi keluar Kota Ambon, sebab tiada jaminan keamanan dari pemerintah daerah maupun pihak keamanan di Kota tersebut. (Lambang Triyono, 2001: 35-68). Seperti halnya kejadian di Batumerah kurang lebih pada bulan Juni tahun 2010. Warga Batumerah mengancam akan terjadi konflik dalam kaitannya dengan rencana eksekusi ratusan bangunan milik warga di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman oleh pemerintah Kota Ambon menuai protes warga maupun elemen kepemudaan. Aksi ini dimotori oleh warga dan melibatkan komponen mahasiswa. Para demonstran tersebut mengancam akan terjadi konflik seperti halnya di Kota Jakarta apabila pemerintah Kota menggusur warga Batumerah yang berjumlah 100 kepala keluarga (Ambon Ekspress, 8 Juni 2010).

Dari kenyataan di atas menunjukkan bahwa bahaya laten akan terjadinya konflik masih mengancam warga Kota Ambon, terbukti pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010 terjadi perkelahian warga kampung Batumerah Dalam dan Batumerah Kampung Kecamatan Sirimau Kota Ambon, konflik tersebut menyebabkan seorang warga meninggal dan tujuh rumah terbakar. Bentrokan pada jumat malam tersebut merupakan bentrokan ketiga dalam sebulan terakhir. Sebelumnya bentrokan kedua terjadi pada 14 Juni 2010 dan 3 Juli 2010 (Kompas, 11 Juli 2010).

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang Pelestarian tradisi dan budaya *Pela Gandong* bagi pencegahan konflik sosial di Kota Ambon. Penelitian ini berusaha menelaah faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan kolektif, yang terjadi di Kota Ambon. Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul pertanyaan sejauh mana budaya dan nilai tradisional *Pela Gandong* mampu menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial masyarakat Kota Ambon yang multikultural. Maka pertanyaan penelitian yang diajukan guna mengkaji informasi tentang kadar sikap kesetiakawanan sosial di daerah yang rentan terjadinya konflik sosial adalah sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial pada masyarakat Kota Ambon yang multikultural. Selain itu juga seberapa besar kadar kesetiakawanan sosial warga Kota Ambon pasca konflik, serta sejauh mana peranan *pela gandong* yang merupakan nilai tradisi dan budaya, menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial, guna mencegah konflik sosial. Diharapkan tradisi dan budaya tersebut, mampu meredam terjadinya konflik sosial, dengan demikian akan tercapai perdamaian di Kota Ambon. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan masukan tentang kebijakan publik bagi Kementerian Sosial, guna membenahi berbagai kondisi, demi mencegah terulangnya konflik sosial yang terjadi di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait guna mengetahui peran budaya dan nilai tradisi *Pela Gandong* yang mampu menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial, disamping itu juga mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab, terjadinya kekerasan kolektif di Kota Ambon. Tulisan ini juga dapat digunakan sebagai masukan kepada berbagai pihak yang peduli pada masalah konflik sosial di Kota Ambon.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ambon, Propinsi Maluku, dan dalam penelitian ini analisisnya adalah individu dan masyarakat. Penelitian ini merupakan studi kasus deskrpitif, yang merupakan strategi paling cocok untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa dalam penelitian ini dipergunakan dua strategi yaitu studi kasus dalam suatu survai. Pertanyaan "bagaimana" atau "mengapa" akan diarahkan pada serangkaian peristiwa kontemporer, yang mana peneliti hanya memiliki peluang kecil, atau bahkan tidak mempunyai peluang sama sekali untuk melakukan kontrol pada peristiwa tersebut. (Yin, 2002, 13), dipilih sampel lokasi secara *purposive sampling*, yaitu daerah yang sering terjadi konflik antarwarga dalam penelitian ini difokuskan pada Kota Ambon, Jumlah responden adalah 30 Orang, Pengumpulan data para pelaku dan korban konflik ,dengan cara *accidental* penentuan subyek penelitian tokoh masyarakat, petugas dari dinas sosial *purposive sampling* mereka adalah pelaku, korban maupun petugas yang berwenang serta berbagai pengurus organisasi sosial, yang terlibat dalam penanganan masalah konflik di Kota Ambon. Teknik pengumpulan data dipergunakan *interview*, observasi, serta penggunaan data sekunder yang dianggap relevan, berkaitan dengan konflik sosial di Ambon.

B. Kajian Teori

Pada dasarnya terjadinya kekerasan kolektif antara lain disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah selama 32 tahun terakhir tidak berbasis kerakyatan dan tidak berpihak kepada upaya pemberdayaan masyarakat. Kedua lemah dan kurang berwibawanya aparat penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum. Ketiga, kekerasan kolektif horisontal itu disebabkan memudarnya nilai tradisi dan budaya lokal "*pela gandong*" dikalangan generasi muda, sebagai dampak dari modernisasi. Disamping itu juga perilaku sebagian masyarakat pendatang yang tidak dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat berdasarkan prinsip "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung", serta kekerasan dan unjuk

kekuatan oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan memakai simbol-simbol agama atau -slogan berbau agama.

Menurut pendapat Hannah Arendt, Kekerasan terjadi karena adanya beberapa aspek antara lain: Kekuasaan (*power)* merupakan kemampuan pribadi manusia, untuk bertindak maupun bertindak secara bersama-sama. Kekuasaan tidak pernah merupakan hak milik seseorang, ia adalah milik kelompok, tetap ada sepanjang kelompok itu bersama. Ketika seseorang mengatakan tentang seseorang bahwa ia sedang berkuasa (*in power*), maka kita dapat menyebut seseorang yang berkuasa tersebut tengah diberdayakan oleh sejumlah orang untuk bertindak atas nama mereka. Saat kelompok tersebut, dari mana kekuasaan mula-mula berasal (*potestas in populo*), maka dapat dikatakan tanpa sebuah rakyat atau sebuah kelompok tidak akan ada kekuasaan, berarti menghilang kekuasaanya. Dalam pemakaian kata "kekuasaan" saat ini, ketika kita berbicara mengenai seorang manusia yang kuat (*powerful personality*). Kita telah menggunakan kata "kekuasaan" (*power*) secara metamorfosis, apa yang kita rujuk tanpa metafora adalah "kekuatan" (*strength*). Arti dari kekuatan (*strength)* adalah sesuatu dalam sebuah entitas tunggal atau individual; kekuatan adalah hak milik yang inheren dalam sebuah obyek atau seseorang dan menjadi karakternya, dalam hubungannya dengan benda atau orang lain. Daya paksaan (*force)* seringkali digunakan dalam perkataan sehari-hari, sebagai sinonim dengan kekerasan, terutama jika kekerasan berfungsi sebagai suatu bentuk alat paksa. Otoritas (*authority*), yang berkaitan dengan fenomena yang paling sukar dipahami dan karenanya, sebagai sebuah istilah, paling sering diselewengkan Pada akhirnya berdasarkan karakter instrumentalnya, maka secara fenomenologis, kekerasan sangat dekat dengan kekuatan, karena kekerasan merupakan alat untuk melipatgandakan kekuatan alamiahnya. (Hannah Arendt, 2003: 40-42) Selanjutnya menurut Konrad Lorenz dalam Errich Fromm, keagresifan manusia merupakan insting yang digerakan oleh sumber energi yang selalu mengalir dan tidak selalu merupakan akibat dari reaksi terhadap rangsangan luar. Selanjutnya Lorenz berpendapat bahwa energi khusus untuk tindakan insting mengumpul secara kontinyu di pusat syaraf yang ada kaitannya dengan pola tindakan tersebut, dan akan terjadi ledakan jika energi sudah terkumpul, sekalipun tidak ada rangsangan dari luar. Intensitas kedestruktifan dari dorongan agresi, merupakan konsekuensi dari proses seleksi intra spesifik (yang terjadi pada kehidupan manusia, karena agresi diantara anggota *species* yang sama) adapun fungsinya adalah untuk mempertinggi daya tahan hidup (Erich Fromm, 2008: 9-11).

Sosiolog Horton mengemukakan beberapa dalil yang menjelaskan terjadinya kekerasan kolektif, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: *Self group atau in group* (dimana orang menjadi anggota kelompok) dan *other group atau out group* (kelompok lain yang berhadapan dengan *self group*) yang tidak berbeda banyak kekuatannya cenderung berhubungan secara saingan apabila tujuan hidupnya sama. Apalagi jika tujuan antar kelompok tersebut berbeda. Kedua kelompok (*self group dan out group*) tersebut dapat hidup bersama atas dasar *co-existence. Self group* dan *other group* yang merasakan di dalam diri kelompoknya terdapat satu sifat kelemahan terhadap group lawannya. Hal ini cenderung meningkatkan dan memaksimalkan sifat-sifat yang dirasa lebih unggul untuk memperkuat rasa superiornya kepada group yang dianggap lebih lemah dengan kekerasan atau cara lain dan tidak menghiraukan nilai moral. Dalam hubungan antara *self group* dan *other group* cenderung munculnya prasangka (*prejudice)* yaitu anggapan tentang adanya sifat-sifat positif atau negatif pada group (kelompok) lawan. Pada *self-group* yang merasa dirinya inferior terhadap *other-group* dan tidak mampu mengangkat dirinya cenderung tumbuh rasa tidak puas terhadap status inferial kadang kala meledak dalam bentuk protes atau memberontak (Horton, 1990: 233).

Kerusakan pertalian sosial merupakan penyebab terjadinya konflik. Kesamaan keanggotaan kelompok dan saling ketergantungan menjadi pengikat diantara beberapa kelompok untuk menjaga stabilitas hubungan yang tinggi. Namun sebaliknya pertalian sosial justru memberikan sumbangan terhadap eskalasi konflik, apabila pihak yang berfungsi sebagai tempat bergantung tidak dapat dipercaya, karena tidak

mampu melaksanakan fungsinya. Terdapat hubungan yang bersifat kurva linier antara luasnya ketergantungan dengan eskalasi potensi. Selanjutnya komponen potensi eskalasi tersebut menghilang, akhirnya suatu pihak menjadi semakin dependen, dengan pihak lain. Sampai pada suatu titik dimana, pihak lain tidak dapat memenuhi kebutuhan pihak yang bersangkutan, secara memadai. Pada titik ini dan seterusnya kemungkinan eskalasi justru meningkat (Dean G. Pruitt dan Jefree Z. Rubin, 2004: 163-164)

Pertentangan antar etnis, ras, suku, agama tersebut, merupakan kelompok mayoritas yang melakukan penekanan kelompok minoritas, apabila tidak segera diatasi akan membawa peluang disintegrasi sosial bangsa. Para sosiolog pada umumnya membedakan tiga jenis utama kelompok minoritas, yaitu:a) Minoritas rasial, yaitu mereka yang dapat dibedakan sebagaian besar atau semata-mata, dalam hubungan dengan ciri biologisnya. b) Minoritas etnik, yaitu mereka yang dapat dibedakan menurut warisan kebudayaannya, bukan menurut ciri biologisnya. c) Minoritas religius, yaitu mereka yang terutama dapat dibedakan menurut tradisi keagamaan mereka. (Sanderson, 1993: 380) Indonesia memiliki ras, etnik, dan religi yang majemuk, sehingga kelompok minoritas tersebut sangat mewarnai tata kehidupan sosial dan akibatnya sangat mudah menimbulkan konflik.

Berdasarkan teori konflik kelompok menurut ahli antropologi sosial Sears, konflik akan terjadi secara kolektif dalam masyarakat karena adanya kekurangan relatif (*relative deprivation*). Teori ini berkaitan adanya ketidakpuasan dalam kelompok yang tidak hanya timbul dari kekurangan secara obyektif, tetapi juga perasaan kurang secara subyektif yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok atau orang lain. Bila seseorang merasa kurang dibandingkan dengan kelompok lain, maka mereka akan mengungkapkan kejengkelannya melalui anorganisme kelompok. Selanjutnya di samping itu juga karena dua kelompok yang bersaing untuk saling memperebutkan sumber yang langka. Teori ini disebut teori konflik kelompok. misalnya permusuhan antar etnis Bugis dan Maluku yang memperebutkan lahan tempat berdagang (Sears, dkk, 1974: 157). Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya kepedulian masyarakat, terhadap permasalahan sosial, bergesernya budaya dan nilai masyarakat tradisional menuju budaya masyarakat modern ditandai dengan melunturnya sikap kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan,

Kesetiakawanan Sosial atau rasa solidaritas sosial adalah merupakan potensi spritual, komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa, oleh karena itu kesetiakawanan sosial merupakan nurani bangsa yang teraplikasi dari sikap, serta perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial warga masyarakat, dijiwai semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama. Oleh karena itu kesetiakawanan sosial merupakan nilai tradisi dan budaya, perlu dilestarikan sebagai modal sosial (*Social Capital*) yang ada dalam masyarakat, terus digali dan dikembangkan Menurut Arief dalam info Societa ada beberapa aspek dari kesetiakawanan sosial meliputi: Kepedulian Sosial, Gotong royong, Ikhlas berkorban kebersamaan, musyawarah (MF. Arief, 2008, 6) Mengacu pada pemikiran Emile Durkheim dalam James M. Henslin, dalam masyarakat terdapat solidaritas mekanik, merupakan solidaritas yang terbentuk karena adanya pandangan dan perasaan yang sama, selain itu juga adanya solidaritas organik, yaitu solidaritas antara individu dalam masyarakat karena adanya ketergantungan dalam melakukan pekerjaannya atau berkaitan dengan mata pencaharian dalam hidupnya. Ciri nilai kesetiakawanan sosial merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi antar para anggotanya dan diturunkan dari generasi ke generasi (James. M. Henslin, 2002: 116-154).

Melalui konflik berbagai pendapat dan norma yang sifatnya prural akan memperluas integrasi antar etnis yang sangat jamak. Sebab pada dasarnya konflik merupakan hasil dari interaksi sosial menuju pembentukan sistem sosial yang terjadi karena adanya proses sosial. Menurut Gillin dan Gillin terdapat 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu: a) Proses yang asosiatif (*process of association*) yang terbagi ke dalam tiga bentuk khusus: akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. b) Proses yang disosiatif (*process of dissociation*) yang mencakup persaingan.

Melalui proses akomodasi seseorang akan mencari suatu keseimbangan untuk meredakan konflik. Dalam cara disasosiatif, cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan serta mengusahakan terjadi peleburan (asimilasi) dan akulturasi dalam anggota kelompok-kelompok sosial yang berbeda kebudayaannya, kemudian menyesuaikan diri.

Gillin menyebutkan faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi dan akulturasi, yaitu toleransi (kesetiakawanan dan keserasian sosial). Kesempatan di bidang ekonomi secara seimbang, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Sikap keterbukaan terhadap golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. d) Perkawinan campuran (*amalgamation*), dan adanya ancaman musuh dari luar. Asimilasi menyebabkan perubahan hubungan sosial dan perubahan pola adat-istiadat serta interaksi sosial yang disebut akulturasi (Gillin & Gillin, 1954: 487-488). Perbedaan asimilasi dan akulturasi dilukiskan dalam Gambar 1. Asimilasi bukan merupakan proses yang searah melainkan proses dwiarah (*two-way process*) karena menyangkut hubungan pihak yang diintegrasikan dan kelompok anggota-anggota lain yang mengintegrasikan diri.

Proses integrasi sosial bukan suatu proses yang berjalan cepat karena merupakan suatu proses mental. Integrasi merupakan suatu ikatan berdasarkan norma yaitu melalui norma kelompok akan membentuk suatu unsur yang mengatur perilaku dengan mengadakan tuntutan tentang bagaimana orang harus bertindak. Integrasi tersebut akan dapat berhasil apabila, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain, sehingga tercapai semacam konsensus mengenai norma dan nilai sosial, normayang cukup lama konsisten dan tidak berubah-ubah. Apabila anggota masyarakat merasa, bahwa mereka tidak dirugikan dalam kehidupan kelompok, atau merasa bahwa keuntungan yang diperoleh dari kelompok masih lebih besar dari pada ruginya maka dengan sendirinya anggota masih merasa aman dalam kelompoknya (Ogburn, 1964: 102).

Pemahaman tentang kesetiakawanan sosial sangat berkaitan dengan kehidupan manusia yang damai, menurut Johan Galtung adalah adanya perdamaian diartikan tidak adanya atau berkurangnya jenis kekerasan, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non kekerasan. Menurut pendapatnya pada definisi pertama, memiliki konsekuensi pada kerja perdamaian, yaitu kerja untuk mengurangi kekerasan de-

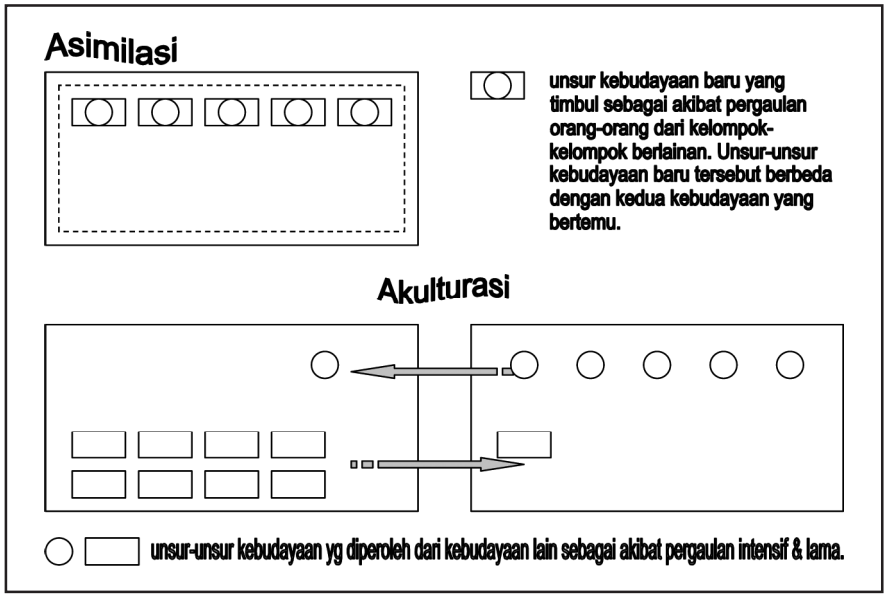

Gambar 1.
Asimilasi dan Akulturasi

ngan cara-cara yang damai. Sedangkan definisi kedua konsekuensi studi tentang kondisi kerja perdamaian, sehingga diagnosis, prognosis, terapi dapat diterapkan. Sebagai pembawa perdamaian adalah setiap orang (Galtung, 2003: 21). Faktor-faktor yang mempengaruhi perdamaian antara lain struktur, budaya, identitas dsbnya. Sedangkan aktornya adalah semua masyarakat. Sikap kesetiakawanan sosial merupakan modal sosial untuk mengatasi terjadinya konflik, menuju perdamaian. Menurut Pierre Bourdieu dalam Ari Dwipayana, mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya dan potensial yang dimiliki oleh seseorang, berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk Pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial), yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Sedangkan menurut James Coleman modal sosial sebagai sesuatu yang mempunyai dua ciri yaitu pertama aspek dari struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk modal sosial adalah berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, kedua hubungan otoritas serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat. Potensi untuk memperoleh keuntungan dan perlakuan khusus yang berasal dari mereka yang memiliki rasa simpati dan kewajiban adalah esensi utama dari modal sosial. Adapun bentuk modal sosial, meliputi tiga level yaitu nilai, institusi dan mekanisme. Bentuk-bentuk modal sosial adalah berupa kewajiban dan harapan serta potensi informasi, norma dan sangsi yang efektif, hubungan otoritas juga organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat. Adapun fungsi dari modal sosial tersebut adalah untuk mengatasi berbagai hambatan kolektif guna menciptakan kerja sama dalam komunitas. Pada masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Modal sosial bisa berfungsi untuk memelihara integrasi sosial atau mengatasi konflik di masyarakat.

Pada hakekatnya modal sosial menjadi sangat penting artinya untuk mencegah disintegrasi sosial dan membangun integrasi sosial, dalam masyarakat yang rawan konflik. Upaya menciptakan fasilitasi proses rekonsiliasi dalam masyarakat pasca konflik. Modal sosial mewujudkan komunitas sipil yang humanistik dan beradab. Komunitas yang melembaga dan dilandasi oleh sikap kesetiakawananan sosial, merupakan salah satu wujud modal sosial, karena adanya beberapa aspek potensi sosial antara lain kesepakatan, konsensus berdasarkan kesetaraan politik, solidaritas sosial, toleransi, dan kerjasama dan kepercayaan satu sama lain (*mutual trust)* diantara warga masyarakat (AA. Dwipayana, 2001: 31).

C. Hasil Penelitian: Pelestarian Tradisi *Pela Gandong*

1. Tradisi, Nilai Sosial dan Budaya Kota Ambon Pascakonflik Sosial

Letak dan batas wilayah Kota Ambon sebagian besar berada dalam wilayah pulau Ambon dan secara geografis terletak pada posisi 3º-4º lintang selatan dan 128º-129º Bujur Timur, dimana secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan kabupaten Maluku Tengah. Batas sebelah selatan adalah Laut Banda, kemudian batas sebelah Barat adalah Petuanan Desa Hatea, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Menurut sejarahnya Kota Ambon dimulai pada tahun 1575, saat dibangunnya benteng Portugis di Pantai Honipopu sering disebut Benteng Kota Laha atau Ferangi. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut kemudian mendiami sekitar benteng. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut dikenal dengan nama Soa Ema, Soa Kelang, Soa Silale, Hative Urimessing dan sebagainya. Kelompok-kelompok masyarakat inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya Kota Ambon. Sejak awal kepulauan Maluku didiami oleh dua suku asli yaitu suku Alune dan suku Wemale. Dari kedua suku tersebut berkembang sejumlah suku seperti halnya suku Akifuru, Togitil, Faru, Ternate, Seram, Buru, Takabu, Tobelo, Banda, Rana serta Moa. Dari keberagaman suku – suku itulah muncul nama Maluku. Sedikitnya terdapat 41 sub etnis yang mendiami kepulauan Maluku. Pada abad ke 13 para saudagar Arab tertarik dengan rempah-rempah yang dihasilkan dari kepulauan tersebut. Akhirnya mereka beramai-ramai singgah di kepulauan tersebut. Memberikan nama sebagai Jazirah Al-Muluk, yang berarti banyak raja. Dalam perjalanan sejarahnya banyak raja di kawasan Maluku yang terpikat dengan ajaran

Islam. Kemudian memunculkan kerajaan Islam antara lain Bacan, Jailolo, Ternate dan Tidore. Letak dan posisi Maluku secara geografis memang cukup strategis, diapit oleh dua samudera yaitu pasifik oleh sebab itu tidak heran apabila sampai saat ini banyak pendatang yang ingin bermukim di kepulauan Maluku ini. Pada sekitar tahun 1512 orang portugis mulai masuk ke Hitu di Pulau Ambon, sepuluh tahun kemudian orang portugis bersekutu dengan Ternate, mereka mulai membangun pangkalan dan beteng di sekitar Ternate, secara perlahan pertahanan Portugis di kembangkan. Protugis selain berdagang juga berusaha mengembangkan agama kristen. Oleh sebab itu wajar jika kepulauan Maluku sebagian besar menganut Agama Kristen.

Seperti layaknya Kota-Kota lainnya di Nusantara di bawah pemerintahan resmi Belanda, secara vertikal penduduk Ambon dibagi kedalam tiga kelompok yang mengacu kepada ras tubuh yaitu masyarakat Eropa dan orang orang etnik dan kaum sipil urban (Burgerij). Kategori pertama adalah orang Portugis yang masih menetap meski Belanda telah menguasai seluruh Kota. Mereka juga disebut kaum Mardijker, sehingga mereka menempati sebuah wilayah yang disebut Mardika. Kaum Mardijker kemudian menjadi mediasi diserapnya kebudayaan lokal Kota Ambon. Mulai dari busana, nama keluarga. Pada umumnya orang Mardika memiliki solidaritas vertikal yang kuat terhadap Portugis. Selanjutnya ada pula sebuah *Inlandsche Burgerij* merupakan warga Kota yang bukan orang Ambon. (Hatib Abdul Kadir, 2009: 58).

Konstruksi terhadap etnis tertentu sangat tajam, meski orang tersebut lahir dan dibesarkan di wilayah Kota Ambon, sepertihalnya warga etnis Buton, asal usul mereka adalah migran muslim, yang kebanyakan tinggal di wilayah pesisir seperti di daerah Kampung Silale yang sangat padat dan kumuh. Penduduk Kota Ambon memiliki latar belakang kedekatan dengan birokrasi kolonial, sementara itu orang Buton tidak mempunyai tempat khusus dimata kolonial Belanda dan bahkan dalam birokrasi modern setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Penghasilan orang Buton sangat rendah dan mata pencaharian lebih banyak berada di sektor informal, mereka tidak terdidik. Sehingga dalam penentuan kebijakan politik Kota Ambon, masyarakat Buton ini nyaris tidak masuk dalam perhitungan, dianggap jauh berada di bawah "anak negeri Maluku" atau etnis asli Maluku. Orang Buton dianggap berada di bawah (*inferior)* sering disebut sebagai "anak dagang" Rendahnya tingkat pendidikan orang Buton tersebut, juga sempitnya lapangan kerja, membuat anak-anak muda Buton sering dianggap menjadi pelaku kriminal di Kota Ambon. Bagi kalangan muda, ternyata Kota Ambon merupakan negeri "sebagai tempat kumpul *basudara, gandong*, dan rasa nasionalitas terhadap daerah "atau Kota Ambon yang terus tertanam dalam hati anak muda di Kota Ambon. Mereka masih mengacu kepada tanah Maluku dan Kota Ambon dimaknai adanya keterkaitan emosional pada daerah asalnya. Oleh sebab itu walaupun secara realitas nilai-nilai *pela gandong* sudah mulai pudar, namun ikatan emosional di kalangan generasi muda masih memiliki sikap kesetiakawanan sosial diantara kaum muda. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa wilayah diluar kepulauan Maluku mempunyai kebudayaan yang berbeda, dengan kehidupan di tanah kelahirannya (Hatib Abdul Kadir, 2009: 287).

Kondisi budaya pada dasarnya nenek moyang orang Maluku (anak negeri Maluku) memiliki budaya atau kearifan lokal yang mengatur fungsi dan berbagai sistem antara lain sebagai berikut. Menerapkan sistem pemerintahan dengan pembagian kekuasaan, sistem tersebut telah dilaksanakan oleh nenek moyang orang Maluku, sebelum adanya pengaruh sistem pemerintahan demokrasi. Adapun sistem pemerintahan tersebut meliputi fungsi legislatif (pembuat peraturan) di pegang oleh badan *Saniri* secara berjenjang mulai dari Saniri Besar pada pusat negara, *Saniri Ina Amia* merupakan badan legislatif di tingkat lebih rendah, fungsi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah pada tingkat provinsi atau Kabupaten dan Saniri Negeri di negeri masing-masing kewenangan lembaga legislatif tertinggi di pegang oleh *Misinipi* (seperti MPR di NKRI) Fungsi eksekutif di pegang oleh raja disebut *latu* Apabila ia adalah seorang laki-laki, sebutan di berikan kepadanya adalah *upu latu.* Jika seseorang perempuan diberikan di berikan gelar *Ina latu.* Fungsi yudikatif adalah fungsi peradilan di pegang oleh Hena.

Pada dasarnya nenek moyang bangsa Maluku, mengakui serta meyakini Tuhan yang disebut. *Upulanite* artinya "Tuhan penguasa langit" nama Tuhan yang disembah menurut keyakinan orang Maluku nama agama mereka, adalah Tuhan yang disembahnya. Cara mereka berdoa harus dilakukan di alam terbuka tanpa penghalang. Dalam kegiatan ibadah tersebut harus menggunakan pakaian hitam, sebagai bentuk kesadaran bahwa Tuhan yang disembah adalah suci. Mereka adalah orang yang berdosa, untuk itu perlu menghadap Tuhan dalam suasana berkabung. Pusat atau tempat penyembahan mereka disebut Kakehang. Masyarakat atau warga biasa tidak diperbolehkan berada di Kakehang, hanya tokoh masyarakat (pemimpin masyarakat) juga calon-calon pemimpin yang diperbolehkan berada di Kakehang Apabila ditinjau dari perbedaan agama, warga Kota Ambon tidak menjadikan para warga Kristen dan Islam berpisah, namun sebaliknya membangun dan menciptakan kebudayaan baru yang melewati batas agama guna mengatasi berbagai kebutuhan agama, kearifan lokal yang tetap lestari yaitu antara lain *pela gandong*, *duan tolat* dan sebagainya. Sistim persekutuan/kerukunan hidup orang basudara, merupakan Nilai-nilai tradisional dikalangan warga Maluku, adalah menerapkan kekeluargaan dalam bentuk persekutuan yang rukun sejak leluhur melalui *pela gandong* termasuk pula tentang mekanisme kerja dalam bentuk bagi hasil yang disebut maano (Semuel Waileruny, 2010: 118-122)

Apabila dikaji dari nilai-nilai adat yang dianut, maka warga Maluku Selatan khususnya di Kota Ambon, Seram dan pulau-pulau disekitarnya memiliki nilai-nilai kerukunan atau kesetiakawanan sosial yang disebut "*pela gandong*" merupakan sistem nilai sebagai peredam terjadinya konflik sosial didalam kehidupan masyarakat di Ambon. Sistem ini memungkinkan warga yang berbeda agama ataupun suku yang mengangkat sumpah melalui upacara khusus, berjanji untuk saling hidup rukun, Seperti layaknya saudara kandung. *Pela* berasal dari kata *Pila* yang berarti berbuatlah perilaku kebersamaan. Sistem sosial ini melahirkan *cross cutting affiliation* hubungan pela ini bukan saja terjadi antara negeri yang menganut agama yang sama, namun juga terjadi dengan negeri yang berlainan agama. Hubungan *pela* ini terjadi karena ada beberapa faktor antara lain: 1) hubungan *pela* sebagai balas jasa antara negeri satu dengan lainnya, yang pernah membantu baik secara politik maupun sosial; 2) Hubungan *pela* yang disebabkan adanya hubungan persaudaraan; 3) Hubungan *pela* yang disebabkan terjadinya hal-hal yang luar biasa seperti halnya, perkawinan warga. (Nong D. Mahmada dkk, 2000: 21-22).

Deskripsi pendidikan responden penelitian, persentase tertinggi 22 orang (73,33 persen) dari 30 orang responden adalah berpendidikan SLTA, selanjutnya 5 orang responden (16,67 persen) adalah setingkat D3 (sarjana muda) 3 orang (10 persen) adalah setingkat sarjana. Apabila dikaji dari 30 responden sebagian besar berpendidikan SLTA. Hal ini wajar sebab memang para tokoh adat dan masyarakat yang dipilih menjadi responden, sehingga wajar jika sebagian besar memiliki pendidikan menengah ke atas. Apabila ditinjau dari jenis kelamin 13 orang (43,3 persen) perempuan, kemudian 17 orang (56,6 persen) adalah laki-laki. Dari data tersebut dapat diindikasikan bahwa homogenitas data cukup terjamin, karena jumlah perempuan dan laki-laki sebanding. Selanjutnya jika dari sisi agama maka 11 orang (36,67persen) beragama Islam, sedangkan 16 orang (53,33persen) beragama Kristen. Sedangkan 2 orang (6,67persen) beragama Katholik dan 1 orang (3,3persen) beragama Hindu. Dari sisi agama perkembangan penduduk Kota Ambon dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dapat dikatakan mengalami perkembangan yang sangat berarti.

Akibat perkembangan ekonomi dan meningkatnya arus migrasi dari daerah disekitar Kota Ambon. Maka Kota Ambon dihuni oleh berbagai macam etnis dan agama. Apabila ditinjau secara etnis penduduk Kota Ambon sangat beragam. Selain penduduk asli Kota Ambon, ternyata warga Kota Ambon juga menerima banyak pendatang dari luar seperti halnya suku Buton, Bugis dan Makasar, maupun Jawa. Dari keberagaman etnis penduduk tersebut, juga mempengaruhi keberagaman agama yang dianut oleh penduduk Kota Ambon. Di samping beberapa etnis di atas Kota Ambon juga dihuni oleh warga keturunan Cina dan Arab. Perkembangan data penduduk menunjukkan ada beberapa

etnis migran ke Kota Ambon. Etnis responden terungkap pada Gambar 2 berikut.

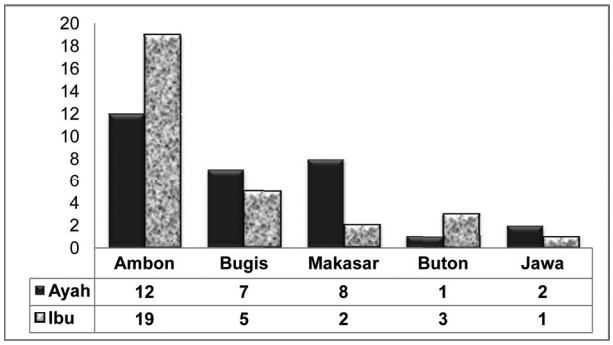

Gambar 2
Etnis dari Kedua Orang Tua (Ayah dan Ibu) Responden
Sumber: Jawaban Responden (N=30)

Gambar 2 menunjukkan bahwa dari 30 res-ponden orang tua mereka baik ayah maupun ibu merupakan bentuk dari keluarga yang multikultural. Perkembangan penduduk menurut etnis di Kota Ambon dengan datangnya berbagai migran, dengan sendirinya mempengaruhi keseimbangan jumlah penduduk asli Kota Ambon yang beragama Kristen dan masuknya migran dari Jawa sejak tahun 1971 yang sebagian besar beragama Islam, karena adanya proyek tahanan politik di Pulau Buru. Seiring dengan meningkatnya kaum migran maka komposisi penduduk dari segi agama juga menunjukkan adanya perubahan penting.

Jumlah penduduk muslim dan Kristen mengalami perubahan secara seimbang. Perkembangan penduduk menurut etnis maupun agama ini, tampak dari makin terimbanginya jumlah penduduk antara penganut Muslim maupun Kristen. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk migran, yang sebagian besar adalah muslim, terutama dari etnis Buton, Bugis, Makasar dan Jawa. Semakin tingginya arus migrasi di Kota Ambon, berarti makin tingginya krisis hubungan antara pendatang dan penduduk asli. Kondisi tersebut diperparah dengan pengembangan struktur pemerintahan yang sentralistik dan otoritarian. Juga makin meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan, dalam bentuk politisasi etnis maupun agama, sehingga merebak fundamentalisme agama dan etnisitas di berbagai daerah di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. Kecenderungan tersebut menyebabkan pendangkalan nilai kultur lokal serta agama, lebih lanjut makin hilangnya modal dan potensi sosial kultural di Kota Ambon. Pendangkalan nilai kulturil lokal dan etnisitas tersebut, Akhirnya makin berkembangnya fanatisme, eksklusifisme, fundamentalisme yang berlawanan dengan prinsip demokrasi dan perdamaian.

Ketergantungan ekonomi pada pemerintah pusat ataupun dari pihak luar tentu menumbuhkan masalah sosial maupun politik tersendiri. Kondisi tersebut menyebabkan penetrasi kapital dan campur tangan politik maupun kapital ekonomi dari pusat yang terlalu besar. Hal ini berakibat terjadinya marginalisasi sektor ekonomi pada aras lokal, serta makin terdesaknya kepemimpinan adat yang selama ini menjadi pengikat kesetiakawanan sosial yang sangat bergantung pada sumber daya lokal. Dari hasil penelitian terungkap data pada Gambar 3.

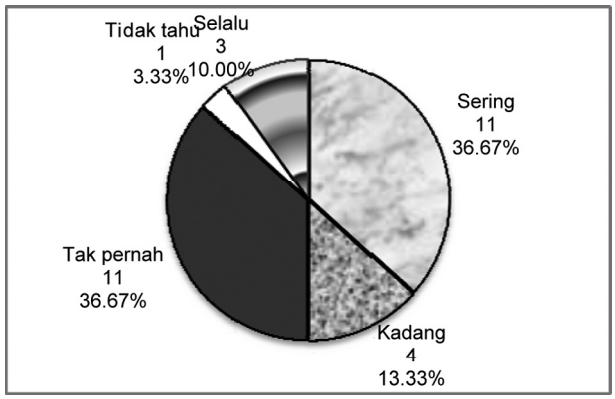

Gambar 3
Respons responden tentang frekuensi permusyawaratan dan pemufakatan antara tokoh masyarakat, pemerintah, dan warga Kota Ambon (N=30)

Dari Gambar 3 tampak bahwa pertemuan dan musyawarah para tokoh masyarakat/pemerintah dengan warga masyarakat, dari 30 orang responden, terungkap 15 orang (50 persen) menyatakan “kadang-kadang” dan “tidak pernah”. Dari data tersebut berarti hanya 50 persen responden menyatakan mengikuti dan selalu melaksanakan musyawarah dengan pimpinan pemerintah atau tokoh masyarakat lokal. Kejadian yang sering memicu konflik karena kurangnya

permufakatan dan pelaksanaan musyawarah antara pimpinan adat, warga masyrakat lokal serta pemerintah. Dari data hasil penelitian juga terungkap rendahnya frekuensi pelaksanaan musyawarah atau permufakatan atas berbagai masalah sosial di Kota Ambon dari 30 orang responden setiap tahun 15 orang (50 persen) menyatakan tidak pernah dan kadang-kadang.

Data di atas mengindikasikan bahwa tingkat kerjasama diantara berbagai elemen di tingkat lokal masih rendah. Hal ini terjadi karena rendahnya kerjasama antar pemimpin adat lokal dengan birokrasi pemerintah,serta bisnis swasta Dimulai dari gerakan konflik perebutan sumber daya alam antara pemerintah serta masyarakat sipil dan tokoh adat dan masyarakat lokal. Resistensi masyarakat adat terhadap penetrasi bisnis dan birokrasi tersebut bukanlah hal yang baru, tetapi fenomena ketidakadilan sudah berlangsung lama. Rendahnya kerjasama antara berbagai pimpinan dan tokoh masyarakat di Kota Ambon, lebih banyak dikarenakan oleh memudarnya nilai warisan budaya bernama *pela gandong*. Merupakan nilai-nilai kultural lokal yang pada hakekatnya mengajarkan, bahwa masyarakat Kota Ambon yang terdiri dari umat Islam juga umat Kristen berasal dari satu kandung, sehingga setiap warga harus menjaga kerukunan, sikap saling tolong menolong dalam kehidupan masyarakat, sehingga konflik antarwarga harus dihindari.

Ikatan *pela gandong* merupakan jalinan kerukunan antara desa Muslim (salam) dengan desa Kristen (Sarani), sudah diketahui jika di Kota Ambon dan daerah Maluku pada umumnya terjadi segregasi sosial, dimana setiap desa hanya dihuni oleh pemeluk Kristen saja, ataupun pemeluk Islam. Dalam upacara adat ngayian atau basaro (merupakan kidung) dilantunkan *pela gandong*. Apabila diamati maka tampak jika warga Kota Ambon, merupakan mozaik keberagaman etnis dari agama. Selama ini mereka hidup rukun, tetapi seiring dengan pembangunan dan modernisasi, terjadi desakralisasi dan infiltrasi terhadap kebudayaan atau nilai-nilai *pela gandong*. Hal tersebut terjadi karena adanya pendekatan uniformitas atau penyeragaman, sehingga tiada ruang bagi budaya lokal yang seharusnya dikembangkan. Ketidakberdayaan *pela gandong* tersebut juga dipengaruhi pula oleh kenyataan, dimana warga Kota Ambon dan Maluku, penduduk yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku, yang mana mereka membawa nilai-nilai budaya sendiri, para migran sebagai pendatang tidak banyak mengenal tradisi *pela gandong* dengan upacara *panas pela*. Terungkap dari hasil observasi sebagian dari warga masyarakat, melakukan penetrasi terhadap salah satu kelompok. atas dasar kepentingan tertentu. Terbatasnya ruang partisipasi politik, juga makin sempitnya ruang gerak warga masyarakat di Kota Ambon. Akhirnya potensi sosial budaya masyarakat terpasung, dampak dari kondisi di atas, nilai agama, serta etnisitas mudah dimanipulasi demi tujuan politik penguasa. Situasi demikian lebih jauh memudahkan warga tersulut oleh isu-isu kekerasan dan konflik sosial.

Migrasi penduduk dari luar daerah yang terus mengalir ke Kota Ambon dalam beberapa puluh tahun terakhir. Ternyata menciptakan pelapisan sosial dalam kehidupan masyarakat, para migran tersebut terutama berasal dari pulau terdekat, seperti halnya Sulawesi Utara, dan Selatan, terutama suku Buton, Bugis, Makasar. Para migran dari Sulawesi Selatan umumnya bermukim di pesisir pantai, sedangkan di Kota Ambon mereka kebanyakan melakukan usaha dibidang perdagangan. Secara perlahan namun sistematis, berkembang pembagian kerja secara etnis dan agama di Kota Ambon. Secara pasti tumbuh menjadi lapisan baru yang menguasai sektor perdagangan, lazim disebut “anak dagang” berbeda dengan kebanyakan warga asli Ambon yang disebut “anak negeri” dan bekerja di sektor jasa dan birokrasi.

Walaupun sudah cukup lama warga dari berbagai etnis tersebut tinggal di Kota Ambon, namun proses adaptasi sosial budaya antara anak negeri dan anak dagang yang menumpang di atas, tanah anak negeri tersebut, ternyata menumbuhkan perasaan dan tujuan yang berbeda di mana orang menjadi anggota kelompok (*self group dan out group)* dapat hidup atas dasar *co existence*, *self group* dan *another group* yang merasakan dalam diri kelompok pendatang terdapat satu sifat kelemahan, terhadap kelompok warga asli yang sering disebut anak negeri sehingga ada kecenderungan “anak negeri” berusaha meningkatkan serta memaksimalkan

sifat-sifat yang dirasa lebih unggul guna memperkuat rasa supremasinya kepada kelompok "anak dagang" yang dianggap lebih lemah, dengan perilaku kekerasan atau cara yang tidak bermoral. Anak dagang secara sosial hanya memiliki kewajiban mematuhi adat setempat tanpa hak untuk memilikinya. Para "anak dagang" yang menggarap tanah baru secara sah memiliki tanah secara sosial ,apabila mereka sudah diterima setelah melalui proses adat sebagai "anak negeri". berdasarkan etnis maupun agama di Kota Ambon ini merupakan potensi konflik terpendam yang pada saatnya dapat berpotensi menjadi konflik terbuka, ketika tidak ada mekanisme pembagian kekuasaan yang jelas dan kehilangan kekuatan kontrol dari kecil secara tradisional warga Kota Ambon yang selama ini menganut nilai-nilai adat dan budaya. *Pela Gandong* adalah institusi sosial yang berfungsi untuk mengikat desa muslim (negeri salam) dan desa kristen (negeri sarani) dalam ikatan *Pela* dan *gandong*. Pada dasarnya kedua ikatan itu merupakan mekanisme hubungan sosial guna mencegah terjadinya konflik antar warga. *Pela* diartikan sebagai suatu ikatan hubungan antara dua ataupun lebih desa salam (Islam) dan sarani (Kristen) berdasarkan kontrak perjanjian untuk tidak berkonflik satu sama lain. Sedangkan *gandong* adalah ikatan sosial antar negeri atau desa berdasar hubungan darah atau keturunan. Arti dari *gandong* adalah berarti kandungan merupakan ikatan berhubungan antar saudara satu keturunan.

2. Solidaritas dan Kesepakatan Masyarakat Kota Ambon dalam Menaati Peraturan

Akibat terparah kekerasan dan konflik di Kota Ambon adalah semakin menurunnya wibawa adat serta pranata sosial bahkan tokoh masyarakat. Sebab makin meluasnya dua pijakan nilai-nilai sebagian tokoh adat masih percaya jika ikatan adat, mampu menautkan kelompok masyarakat di Kota Ambon, tetapi di sisi yang lain sudah tidak percaya lagi dengan pranata adat. Adanya anggapan bahwa *Pela Gandong* merupakan ungkapan para orang tua sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kemajuan jaman. Hasil penelitian diharapkan diperolehnya informasi mengenai kadar kesetiakawanan sosial, yang berkaitan dengan solidaritas warga, kesepakatan dalam mentaati peraturan yang telah disepakati bersama. Dari data hasil penelitian 63,33 persen para responden menyatakan bahwa 7 orang (23,33 persen) "tidak pernah" dan 12 orang (40 persen) menyatakan kadang-kadang mentaati peraturan yang sudah disepakati bersama antar warga, dari data di atas mengindikasikan bahwa tingkat solidaritas dan kesepakatan dalam mentaati peraturan rendah, hal ini karena ketidak percayaan pada aparat keamanan serta munculnya saling curiga. Hal ini disebabkan karena penegak hukum dipandang sudah terseret masuk dalam situasi konflik yang ada. Aparat yang beragama Islam, membantu warga yang beragama Islam, sebaliknya aparat yang beragama Kristen dituding membela komunitas Kristen. Warga Kota Ambon mengalami keputusasaan (*desperation)* yang sangat menekan mental mereka. Keputusasaan tersebut disebabkan ketidakpercayaan mereka, pada upaya pelaksanaan dialog guna memecahkan masalah. Akhirnya mereka memilih kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Akar permasalahan di Kota Ambon adalah faktor ketidak adilan, baik dibidang ekonomi, politik maupun secara hukum, selain itu juga marginalisasi peran yang disebabkan oleh bergesernya komposisi penduduk Kristen dan Islam. Makin meningkatnya jumlah penduduk beragama Islam, ketidakseimbangan tersebut menumbuhkan kecurigaan diantara para warga di Kota Ambon. Dari data hasil penelitian terungkap 73,33 persen warga Kota Ambon menghendaki adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk membangun kembali Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon. Berarti upaya hidup gotong royong saling menghormati, ternyata menjadi dambaan setiap insan di Kota Ambon. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang didambakan setiap warga Ambon sebagai *Pela Gandong* melemah karena adanya proses modernisasi, sehingga masyarakat yang semula *gemenschaf* berubah menjadi *gesselchaf*. Terjadinya perubahan dari sifat yang akrab antara sesama warga masyrakat, karena kemajuan akibat modernisasi ikatan tersebut makin melemah, sehingga hubungan sosial dalam masyarakat semakin pudar, terutama di kalangan kaum muda Kota Ambon. Kenyataan menunjukkan bahwa walaupun pernah terjadi konflik, masih ada upaya warga Kota Ambon untuk mencari

berbagai solusi atas konflik dan akibat dari konflik. Hal ini tampak dari upaya-upaya untuk menghindari konflik. Dari hasil penelitian terungkap bahwa setiap peraturan yang sudah disepakati seharusnya diikuti dan warga yang melakukan pelanggaran atas peraturan tersebut perlu dikenai sangsi. Dari 30 orang responden, 20 orang (66,67 persen) menyatakan bahwa para warga "selalu menyepakati" peraturan yang sudah ditetapkan bersama, kemudian 7 orang (23,33 persen) menyatakan "sepakat" "pada peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Dari data tersebut dapat diindikasikan bahwa kadar kesetiakawanan sosial warga Kota Ambon masih cukup tinggi, sehingga secara perlahan-lahan upaya rekonsiliasi dapat dikatakan cukup berhasil, hal ini disebabkan masih banyaknya komunitas Maluku khususnya warga Kota Ambon, yang memiliki keprihatinan moral dan terus menerus mencari solusi menciptakan perdamaian di bumi Ambon. Masih ada inisiatif dari masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Melalui berbagai kesepakatan pendapat dan norma yang sifatnya prural, ternyata mampu memperluas integrasi antar etnis yang sangat jamak di Kota Ambon.

Situasi Konflik terjadi karena pada dasarnya konflik merupakan hasil dari interaksi sosial menuju pembentukan sistem sosial. Hal ini terjadi karena proses sosial berakibat pada proses yang assosiatif (*process of association*) yang terbagi kedalam tiga bentuk akomodasi, asimilasi dan akulturasi. Hal ini tampak dari hasil penelitian terungkap 63,33 persen para responden, menyatakan "selalu melaksanakan kegiatan sosial bersama dalam rukun warga/rukun tetangga di Kota Ambon, kemudian 7 orang (23,33 persen) menyatakan "seringkali melaksanakan kegiatan sosial bersama" dari jawaban tersebut, mengindikasikan bahwa telah terjadi proses akomodasi, antara para pendatang dan orang Maluku, dalam upaya mencari keseimbangan untuk meredakan konflik.

Masuknya migran dari berbagai daerah terutama dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan juga menambah rumit kehidupan sosial di Kota Ambon. Peningkatan arus migrasi ke Kota Ambon ternyata mempermudah sikap saling curiga antar penduduk. Situasi tersebut berpengaruh pada pranata sosial budaya di Kota Ambon. Komunikasi sosial serta nilai-nilai budaya yang selama ini hidup dan berkembang secara alami di Kota Ambon dihilangkan oleh sistem pemerintahan seperti halnya karisma *Bapak Raja*, *Kewang* serta *Marinjo* dan *Kepala Soa* maupun *Kapitan* yang semula merupakan bentuk-bentuk pranata sosial di daerah tersingkir oleh Kepala Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Babinsa. Sistim dan nilai yang berdasarkan kearifan lokal seperti halnya pela tidak dihidupkan lagi karena penyeragaman sistim sosial seperti desa-desa di Jawa. Berdampak pada pudarnya nilai kesetiakawanan sosial di Kota Ambon. Arus migrasi dari luar Kota Ambon, yang bukan orang Maluku, pada umumnya mereka bersikap serta bertingkah laku menurut budaya asli mereka. Budaya yang berbeda tersebut tidak mungkin diatur oleh pengaruh adat Ambon serta hukum adat orang Maluku. Datangnya pendatang yang masuk di Kota Ambon tentunya terjadi akulturasi budaya. Akulturasi pada dasarnya merupakan proses dialektika budaya yang berjalan secara linier dan dinamis, namun ditengah berbagai perubahan sosial budaya tersebut, mengalami distorsi termasuk budaya penduduk Kota Ambon dengan budaya *pela gandong*-nya, kondisi tersebut merupakan dampak dari politik nasional bersifat sentralistik sehingga budaya, dan nilai tradisi serta kearifan lokal yang dimiliki oleh warga Kota Ambon tidak dilestarikan. Selama 20 tahun terakhir sistim tradisional di Kota Ambon mengalami degradasi secara fungsional, karena proses modernisasi yang melanda bangsa Indonesia, menjadi salah satu penyebab terjadinya lengsernya orientasi kebersamaan dan kesetiakawanan sosial. Orientasi nilai budaya *pela gandong* yang merupakan sistem nilai-nilai bagi masyarakat yang berbeda agama, mengangkat sumpah melalui upacara khusus, berjanji menjunjung tinggi sikap kesetiakawanan sosial. Para pemimpin tradisional dalam hal ini tokoh-tokoh adat sudah tidak lagi bersikap aspiratif pada warganya. Hal ini tampak dari perilaku para kepala desa yang lebih sibuk mengurus proyek dari pada mengurus rakyat.

Keanekaragaman budaya Indonesia dilucuti diganti dengan pranata-pranata "modern" dan informasi. Dampak dari pelucutan kearifan lokal dan pranata sosial lokal tersebut, tampak dari

beberapa kekayaan budaya daerah seperti halnya *pela gandong*, pada suatu sisi memang sengaja diangkat ke permukaan, namun hanya sebagai simbol. Disisi lain pranata alat untuk mendukung sikap hidup kesetiakawanan sosial sepertihalnya *pela gandong* yang merupakan sikap hidup warga Kota Ambon secara sistematis dibuat tidak berdaya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Sebagai upaya untuk mendeskripsikan sejauh mana peran nilai tradisi budaya *pela gandong* yang bermakna menjunjung tinggi sikap kesetiakawanan sosial, mampu mencegah terjadinya konflik sosial agar terwujudnya perdamaian di Kota Ambon Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial di Kota Ambon adalah dampak dari perkembangan migrasi penduduk dari sekitar daerah Ambon menyebabkan Kota Ambon dihuni oleh berbagai macam penduduk Meningkatnya jumlah migran muslim ini sedikit banyak menumbuhkan krisis persepsi, hubungan, kecurigaan dan ketegangan sosial antara kedua komunitas tersebut. Situasi tersebut juga dipicu oleh makin banyaknya pengangguran di Kota Ambon, konflik di Kota Ambon ini merupakan suatu proses dalam rentang waktu yang cukup panjang. Kedua Penyesuaian budaya dari pendatang sangat lamban, proses adaptasi sosial kultural "anak dagang" merupakan sebutan dari para migran, terhadap budaya setempat. Berdampak kurang cepatnya proses akulturasi budaya. Di sisi lain, makin surutnya kekuatan dan kewibaan tokoh adat serta pranata sosial, di kalangan generasi muda maka nilai-nilai budaya *pela gandong* sebagai nilai-nilai tradisi kerukunan dan kesetiakawanan sosial, yang menjadi pegangan penduduk asli seiring dengan modernisasi makin pudar keberadaannya. Ketiga Ketergantungan ekonomi Kota Ambon pada pemerintah pusat maupun pihak dari luar, menumbuhkan masalah sosial maupun politik tersendiri. Terjadinya penetrasi kapital serta campur tangan politik, munculnya marginalisasi sektor ekonomi pada aras lokal, juga makin terdesaknya kepemimpinan adat yang selama ini menjadi pengikat kesetiakawanan sosial. Kedudukan mereka sudah terdesak dengan adanya modernisasi, juga makin memudarnya nilai-nilai tradisi *pela gandong* terutama dikalangan generasi muda. Akhirnya peran sikap kesetiawanan sosial di Kota Ambon, tergerus oleh arus informasi maupun modernisasi. Selain itu faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya sikap kesetiakawanan sosial, adalah adanya perebutan sumber daya dan terjadinya erosi budaya,juga belum ditemukannya bentuk solidaritas pola hubungan baru di daerah perKotaan antara "*anak negeri*" dan "*anak dagang".* Hal ini terjadi karena proses asosiatif, yaitu meliputi proses akomodasi, asimilasi, akulturasi dalam kehidupan masyarakat antara "anak negeri" dan "anak dagang" prosesnya sangat lamban. Proses asimilasi dan akulturasi bukanlah proses yang searah, namun proses dua arah (*two way process*). Hal ini terjadi karena kurangnya sikap penghargaan terhadap pendatang atau orang asing,termasuk kebudayaannya, selain itu kurangnya keterbukaan penduduk asli dan golongan yang berkuasa dalam kehidupan masyarakat. Keempat Akibat terparah kekerasan dan konflik di Kota Ambon, adalah semakin menurunnya wibawa adat serta pranata sosial bahkan tokoh masyarakat. Makin meluasnya dua pijakan nilai-nilai, sebagian tokoh adat masih percaya jika ikatan adat mampu menautkan kelompok masyarakat di Kota Ambon, tetapi di sisi yang lain warga Kota Ambon sudah tidak percaya lagi dengan pranata adat. Adanya anggapan bahwa *pela-gandong* merupakan ungkapan para orang tua, bagi generasi muda, sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kemajuan jaman. Berdasarkan hasil observasi ternyata masih ada insiatif berbagai elemen masyarakat Kota Ambon, untuk tetap melestarikan nilai-nilai *pela gandong*, sebagai sikap dasar kesetiakawanan sosial, menuju proses integrasi sosial antar etnis, guna mendorong terbentuknya sistem sosial Keenam Warga berusaha memupuk perdamaian dan solidaritas, melakukan dialog secara horizontal antara tokoh muslim dan Kristen. Kemudian secara vertikal antara tokoh masyarakat dengan warganya, berusaha menangkal isu yang membangkitkan semangat konflik.

2. Saran

Upaya yang harus ditempuh guna merajut perdamaian abadi di Kota Ambon adalah sebagai berikut: Mempercepat pelaksanaan otonomi daerah. Juga berusaha memperkuat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, Disamping itu juga mengembangkan *social capital*. Cara yang ditempuh antara lain: Memperkuat pranata sosial, untuk itu perlu kiranya menghidupkan kembali lembaga adat, mengembangkan toleransi, sikap solidaritas antar umat beragama. Memberikan perlindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kearifan lokal, juga budaya/ adat yang mendukung tercapainya demokratisasi. Upaya memperkuat kelompok masyarakat adat, perlu merekomendasikan pelestarian budaya dan tradisi lokal. Sebab, pada hakekatnya kebudayaan (nilai budaya) menjadi kekuatan penggerak bagi si empunya budaya untuk beraktivitas. Kebudayaan *top down* (dari atas ke bawah) dibangun oleh penguasa bukan untuk kepentingan masyarakat; Mengembangkan modal sosial berupaya memeliharanya serta mempertahankan,nilai kemasyarakatan atau modal sosial, merupakan perwujudan dari kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial. Pemeliharaan serta penguatan *preserve social capital,* sebagai basis kekuatan yang memiliki legitimasi sosial untuk melindungi masyarakat. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, selain itu juga mengembangkan *social capital*. Berusaha mempercepat pembangunan sumber daya alam dan manusia, juga reorientasi pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, menuju pengembangan sosial berdasarkan pemerataan. Oleh sebab itu, perlu kiranya pengembangan pembangun-an kesejahteraan sosial secara integratif antar-instansional. Dalam pengertian modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh (*contingent relations*), seperti pertemanan atau bentuk interaksi kekeluargaan. Jumlah modal sosial yang dimiliki seseorang tergantung pada jaringan hubungan yang dapat dimobilisasikan secara efektif dan tergantung pada volume modal lainnya, ekonomi, kultural, serta simbolik yang dimiliki oleh agen lainnya yang menjadi jaringan. Modal sosial dapat berfungsi untuk memelihara integrasi sosial dan mengatasi konflik di masyarakat, serta berperan penting guna pencegahan terjadinya disintegrasi sosial. Berusaha membangun integrasi dan kohesi sosial di masyarakat majemuk yang rentan konflik haruslah menyentuh perbaikan pada dua dimensi, baik secara struktural maupun kultural. Guna mereduksi konflik kultural diperlukan dialog interpersonal dan interkomunal, sehingga dapat mendobrak dominasi wacana etnis agama. Pola komunikasi yang kaku dan tertutup, menuju komunikasi dan hubungan sosial yang lebih fleksibel, sehingga bangunan persepsi, sikap pandangan yang menjebak ke dalam konflik, bisa didekonstruksi atau dibongkar dari akarnya. Upaya guna membangun hubungan adat yang lebih luas dengan nilai budaya yang tercakup di dalamnya, membutuhkan konstruksi hubungan berdasarkan nilai budaya perlu direvisi dan direfungsionalisasi. Misalnya, dalam bentuk *pela* maka *pela* antaranak negeri dapat dikembangkan menjadi hubungan *pela* antar pulau, *pela* yang satu dengan lainnya menjadi sandaran guna membangun *pela* antarpulau. Diharapkan nilai budaya tetap terjaga keberadaannya dan mampu menjangkau hubungan yang lebih terbuka. *Gandong* berarti satu kandungan, diharapkan pendatang dapat secara perlahan meninggalkan jati dirinya membaur menyatu dengan budaya dari adat anak negeri Maluku dalam lingkungan petuanan mereka tinggal. Dengan demikian pendatang bukan sekedar mencari keuntungan ekonomi dan politik di Kota Ambon, tetapi juga berasimilasi, akulturasi, menyatu dalam kebudayaan.

Melakukan reformasi birokrasi yang berdasarkan asas meritokrasi (ketrampilan/ kemampuan/prestasi) bersifat non-partisan. Berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan (*institusional capacity building*), berupaya selalu mencegah terjadinya konflik, melalui sosialisasi berbagai model penanganan konflik ke masyarakat secara luas juga pengintegrasiannya dalam kehidupan politik. Pengembangan model pencegahan konflik, dalam bentuk sistem peringatan dini (*early warning system*), dalam bentuk intensifikasi dialogis antarkomunitas guna memperkuat kerjasama pembangunan sosial dan kemanusiaan menunjang proses demokratisasi mendorong terbentuknya masyarakat

madani. Perlu kiranya upaya menuju perdamaian dan sosial memelihara suasana damai, pelaksanaan rehabilitasi sosial baik secara fisik maupun mental, menghilangkan berbagai *stereotypes* negatif atas bekas lawan. Penekanan dan pengembangan pendidikan perdamaian guna melestarikan suasana damai berbagai daerah yang terlibat konflik sosial. Melakukan interpretasi realitas yang obyektif dan modal sosial. Dalam interaksi sosial, sebelum seseorang bertindak sebagai tanggapan atas rangsangan (stimulus) yang diterimanya, akan berusaha mengembangkan stimulus melalui pemaknaan proses interpretatif yang sesuai dengan realitas obyektif. Mengembangkan dialog secara rutin antarwarga melalui kegiatan bersama antarwarga, baik secara horizontal antarwarga, maupun secara vertikal dialog antara pihak penguasa dengan warga masyarakat maupun tokoh adat/ agama. Mengembangkan dialog-dialog secara luas dikalangan komunitas warga Kota Ambon di berbagai lapisan mulai dari bawah, menengah, sampai kalangan atas mengenai masalah yang menjadi sumber dampak dari konflik serta upaya penyelesaiannya. Pemberdayaan komunitas untuk meningkatkan kapasitas lokal (*empowerment for local capacity*) mengembangkan model pengembangan komunitas sebagai resolusi konflik agar terjalin komunikasi dan hubungan yang retak akibat konflik, dapat dipulihkan kembali. Merajut damai dengan pengembangan hubungan yang bersifat asosiatif, dalam bentuk kooperasi, akomodasi, asimilasi. Membentuk jaringan dalam konteks modal social, meliputi ikatan antara kelompok dengan orang yang berhubungan dan diikat oleh saling adanya kepercayaan dalam bentuk strategi atau norma. Adanya kerja sama bukan kerja bersama-sama tetapi lebih pada peningkatan kesetiakawanan sosial. Mengembangkan jaringan atau simpul yang kuat menjadikan ikatan kuat. Jaringan tersebut sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan. Ikatan simpul dalam modal sosial adalah norma yang mengatur dan menjaga agar ikatan medianya dipelihara dan dipertahankan.

Strategi penanganan konflik dapat dilakukan melalui berbagai tahap sebagai berikut: Tahap pertama, guna menciptakan upaya perdamaian dan kesetiakawanan sosial, melalui pencegahan konflik (*conflict prevention*), menghentikan kekerasan (*peace keeping*), kemudian membangun perdamaian. Pencegahan konflik dilakukan agar konflik tidak muncul kembali, berupaya menciptakan sistem peringatan dini (*early warning system*) mengklarifikasi rumor, prasangka antaretnis, serta upaya mengurangi kesenjangan dan dominasi, ketidakadilan antarkelompok yang merupakan sumber terjadinya konflik. Upaya penghentian konflik dilakukan dengan cara paksaan atau arbitrasi, pada saat konflik terjadi memanfaatkan aspek komponen hukum, sanksi politik, ekonomi, dan sosial dan budaya, berbasis nilai kultural. Penumbuhan sikap kesetiakawanan sosial dan perdamaian dilakukan pada saat terjadi konflik dengan memfasilitasi berlangsungnya dialog, baik secara vertikal maupun horisontal. Membangun kerangka landasan kebersamaan, agar menemukan kesamaan, mengembangkan sikap saling menerima, berlandaskan sikap kesetiakawanan sosial, cara tersebut ditempuh agar terjadi transformasi konflik, rekonsiliasi tidak hanya menyelesaikan masalah konflik, tetapi lebih luas menjangkau upaya mengubah konflik menjadi suatu bentuk kerjasama menuju perdamaian Tahap kedua penanganan konflik, diperlukan perbaikan tataran struktural yang tepat, untuk pencegahan konflik. Disisi lain, juga perlu perbaikan dimensi kultural, seperti halnya membangun persepsi dan prasangka antarkelompok. Melalui tahap tersebut dapat diciptakan bentuk kerangka landasan guna tercapainya perdamaian, melalui kesepakatan yang lebih mendasar tentang isue, serta mangatasi masalah bersama baik secara personal maupun komunal.

Kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ambon hendaknya bersifat adil dapat diakses oleh semua kelompok. Upaya melakukan monitoring hubungan antarkelompok di Kota Ambon sebagai sistem pengawasan dini, serta terbentuknya rasa percaya dalam pertukaran sosial. Kebijakan publik juga harus mampu mendorong terbangunnya ruang publik di Kota Ambon, dengan memfasilitasi terbentuknya lembaga yang bersifat lintas sektoral. Mengembangkan alokasi sumber daya diarahkan guna mendukung kelompok minoritas yang berdomisili di Kota Ambon, yang terpinggirkan dan berupaya mengendalikan mayoritas. Memfasilitasi dialog antarkomunitas agar fungsi

arbitrasi, menggunakan pendekatan hukum dan keamanan dapat terealisir. Upaya memobilisasi bantuan kemanusiaan sebagai sarana diplomasi untuk mengadakan pendekatan pihak yang terlibat konflik di Kota Ambon. Pemulihan masyarakat (*community recovery*), terutama pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi sosial korban. Diharapkan melalui langkah-langkah tersebut di atas, akan terwujud perdamaian berkelanjutan di Kota Ambon.

Pustaka Acuan

Ari Dwipayana, AAGN dkk, (2001), *Merajut Modal Sosial untuk Perdamaian dan Integrasi Sosial,* Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada.

Erich Fromm, (2008), *The Anatomy of Human Destructiveness*, (diterjemahkan Imam Muttaqin), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, (2004), *Asli Social Conflict, Escalation, Stalemate, and Settlement,* (Diterjemahkan, Helly Soetjipto & Sri Mulyantini Soetjipto), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Brower, M. A. W., (1989), *Kepribadian dan Perubahannya*, Jakarta: Gramedia.

Gillin and Gillin, (1954), *Cultural Sociology A Revision of An Introduction to Sociology*, 3rd printing, New York: Macmillan.

Galtung, Johan, (2003), *Studi Perdamaian; Perdamaian dan konflik Pembangunan, dan Peradaban*, Pustaka Eureka Surabaya

Horton, P. B., Hunt, C. L., (1991), *Sociology*, Jilid I, Penerbit Erlangga, jakarta.

Hannah Arendt, (2003), *Teori Kekerasan*, Diterjemahkan dari *On violence*, penerjemah Ghafna Raiza W, Penyunting Tjahyanto Pudji. J. Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Yogykarta.

Hatib Abdulkadir, (2009), *Bergaya di Kota Konflik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

James. M. Henslin, (2002), *Sosiologi dengan pendekatan Membumi, judul asli Essentials of Sociology: a Down – to Earth Approach*, 6 th Edition, alih bahasa Prof Kamanto Sunarto, SH,Phd. Editor Wibi Hardani, ST. MM, Penerbit Erlangga Jakarta.

Yin, Robert. K, (2002), *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Penerjemah M. Djauzi Mudzakir, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lambang Trijono, (2001), *Keluar Dari kemelut Maluku, Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nong D. Mahmada dkk, (2000), *Luka Maluku: Militer Terlibat*, Institut Studi Arus Informasi (ISAI)

Ogburn, (1964), *On The Culture an Social Change*, Ed. Duncan, Chicago University, Chicago.

Semuel Wailerunny, (2010), *Membongkar Konspirasi Di Balik, Konflik Maluku*, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia.

_____ (2008) Info Societa, Edisi Khusus HKSN, Biro Humas Departemen Sosial R. I. , Jakarta.